

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percepatan pembangunan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir telah menimbulkan berbagai tantangan global yang kompleks, terutama karena sering kali bertentangan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini diukur melalui indikator konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) ternyata seringkali mengabaikan dampak negatif terhadap ekosistem dan ketimpangan sosial. Krisis iklim, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, serta tekanan terhadap sumber daya alam telah mendorong munculnya kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak lagi memadai untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang. Konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial kini menjadi pilar utama dalam kebijakan publik maupun strategi bisnis di tingkat global (Dhar et al., 2022). Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi dipandang hanya sebagai pencipta laba, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Erlangga et al., 2021).

Perusahaan diharapkan mampu bukan sekedar mengejar profit semata, melainkan juga memperhatikan risiko sosial dan lingkungan oleh aktivitas perusahaan. Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) merupakan kerangka pelaporan keberlanjutan komprehensif bagi seluruh jenis organisasi, baik bisnis maupun publik, agar tidak sekedar mengoptimalkan laba melainkan memperhatikan

dampak sosial dan lingkungan. Penerapan konsep ini menjadi semakin krusial mengingat tuntutan publik yang kian menguat seiring bertambahnya kesadaran akan isu lingkungan yang dipicu oleh kegiatan operasional perusahaan. Bahkan, banyak entitas usaha terpaksa menghentikan aktivitasnya akibat masalah pencemaran yang timbul. Akuntansi lingkungan hadir menjadi instrumen strategis untuk memastikan aspek *planet* dikelola dengan baik guna memenuhi regulasi yang semakin ketat dan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim. Integrasi ini menjadikan perusahaan tidak hanya terhindar dari risiko penutupan, tetapi juga lebih mampu bertahan dan berkembang dalam ekosistem bisnis yang kompetitif serta berorientasi pada keberlanjutan (Maghfiroh, 2025).

Sejak 1995, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menjadi salah satu instrumen pemerintah sebagai bentuk pengawasan, penilaian. PROPER mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan, serta menjadi acuan penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingan (Ritonga et al., 2024). Selain itu penerapan PROPER berdampak positif terhadap perlindungan masyarakat dan lingkungan, karena perusahaan dianjurkan untuk memenuhi kewajiban terhadap keberlanjutan lingkungan, sehingga meminimalkan risiko pencemaran akibat limbah industri (Santika et al., 2023).

Peringkat PROPER mengategorikan perusahaan ke dalam lima tingkat peringkat emas, hijau, biru, merah dan hitam. Sistem ini menilai dan mengklasifikasikan perusahaan ke dalam lima kategori berdasarkan kualitas

pengelolaan lingkungannya. Peringkat Emas diberikan kepada entitas yang konsisten menerapkan kepemimpinan lingkungan melalui praktik produksi yang ramah lingkungan, inovasi berkelanjutan, serta komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Peringkat Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melampaui kepatuhan dasar terhadap regulasi dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan yang efektif, efisiensi sumber daya, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Peringkat Biru menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

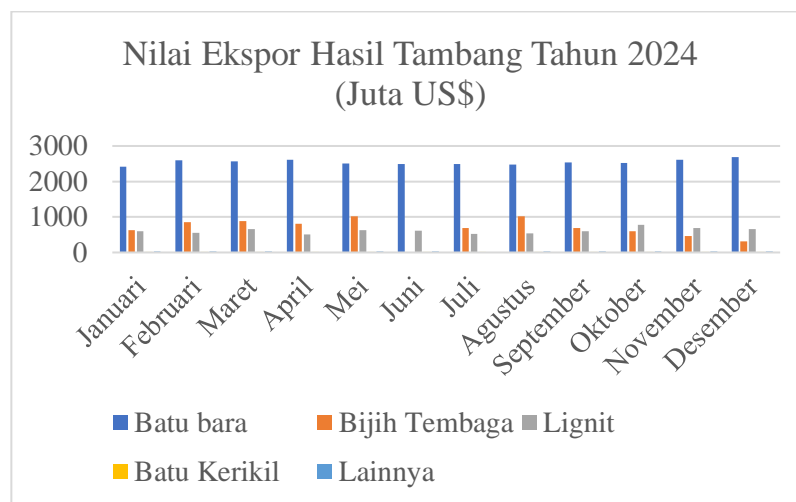
Peringkat Merah diberikan bagi entitas yang meskipun telah menerapkan usaha tertentu, namun implementasinya belum memenuhi standar hukum yang ditetapkan. Adapun peringkat Hitam, sebagai kategori terendah, diberikan kepada perusahaan yang secara sengaja melakukan pelanggaran berat, seperti membuang limbah beracun tanpa izin, mengoperasikan fasilitas tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau menyebabkan kerusakan ekologis yang berdampak luas pada kesehatan masyarakat. Kelima peringkat ini bukan sekedar menggambarkan tingkat kepatuhan, melainkan menjadi cerminan komitmen strategis perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (*Proper - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2021*).

Kondisi ini sangat relevan bagi sektor pertambangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian PROPER periode 2022–2023 yang dipublikasikan oleh KLHK, dari total perusahaan pertambangan yang dinilai, masih terdapat sejumlah perusahaan yang memperoleh peringkat Merah, yang berarti

implementasi pengelolaan lingkungan mereka belum memenuhi standar regulasi yang ditetapkan, meskipun sebagian besar perusahaan pertambangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah berhasil meraih peringkat Biru atau lebih tinggi (*Proper - Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2021*). Fakta ini menggambarkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pengelolaan lingkungan di antara perusahaan pertambangan, sekaligus menegaskan bahwa pencapaian standar minimum kepatuhan belum menjamin tercapainya sustainable development yang sesungguhnya. Kesenjangan ini mendorong pertanyaan mendasar apakah pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang telah benar-benar mencerminkan komitmen substantif terhadap keberlanjutan, ataukah hanya bersifat pemenuhan kewajiban administratif semata (Salsabila & Prijanto, 2025)

Seiring perkembangan zaman, masyarakat menyadari bahwa upaya perusahaan dalam meraup keuntungan maksimal sering kali mengorbankan kelestarian alam melalui eksploitasi yang tidak diimbangi dengan pemulihan. Indonesia yang menjadi salah satu wilayah yang memiliki pertambangan besar di dunia. Pertambangan di Indonesia terdapat di wilayah Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Perusahaan pertambangan menjadi salah satu industri yang berkontribusi terbesar pada perekonomian di Indonesia sekaligus tingkat risiko lingkungan yang tinggi. Perusahaan pertambangan tidak hanya berpotensi merusak lingkungan hidup, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial di sekitarnya, sehingga menempatkannya sebagai perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi (Salsabila & Prijanto, 2025).

Secara global perusahaan tambang merupakan salah satu industri yang sering berhubungan dengan *sustainable development*. Limbah yang dihasilkan dari perusahaan adalah salah satu aspek yang dapat memengaruhi *sustainable* karena dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Perusahaan tambang memiliki peran yang penting dan efek yang signifikan di Indonesia bahkan dunia. Secara khusus perusahaan pertambangan dapat membantu dalam meningkatkan dalam perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), sektor pertambangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor Indonesia, setelah sektor industri pengolahan, sehingga berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional.



Gambar 1. 1 Nilai Ekspor Barang Tambang

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat perkembangan pertambangan di Indonesia memiliki kemajuan, dengan peningkatan produksi untuk ekspor barang tambang selama tahun 2024. Berdasarkan data nilai ekspor bulanan tahun 2024, terlihat adanya dominasi struktural dari komoditas energi fosil, khususnya batu

bara, yang mencatatkan total nilai ekspor tahunan sebesar US\$ 30,49 miliar. Stabilitas kinerja ekspor batu bara yang berada antara US\$ 2,4 sampai US\$ 2,6 miliar setiap bulannya mengindikasikan peran strategis komoditas ini sebagai penyangga fiskal yang menjamin arus kas masuk secara konsisten. Di sisi lain, fenomena fluktuasi ekstrem terjadi pada komoditas bijih tembaga, yang sempat mengalami penghentian aktivitas ekspor total (nol) pada bulan Juni 2024 namun mampu bangkit kembali secara signifikan pada bulan-bulan berikutnya dengan total kontribusi tahunan mencapai US\$ 7,97 miliar (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

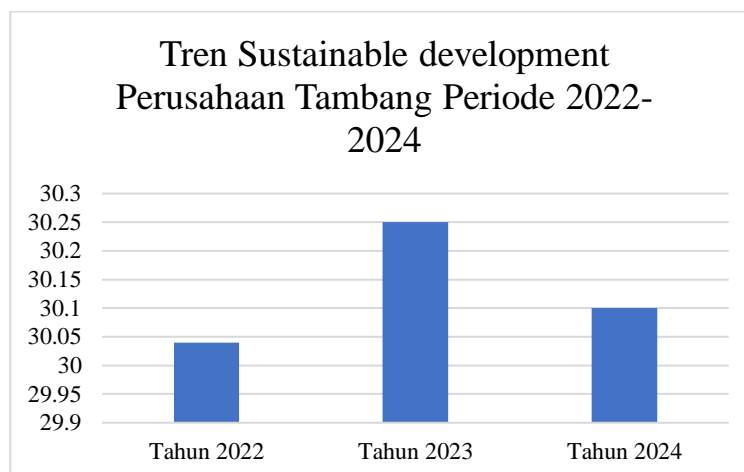
Kondisi tersebut memperlihatkan peran perusahaan tambang di Indonesia sebagai entitas yang mampu memberikan kepastian pendapatan negara melalui komoditas yang stabil seperti batu bara dan lignit, serta sebagai pelaku industri yang memiliki resiliensi tinggi dalam merespons perubahan kebijakan hilirisasi nasional. Akumulasi nilai ekspor yang mencapai puluhan miliar dolar AS ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan operasional dan kepatuhan regulasi dari perusahaan-perusahaan tambang.

Perusahaan pertambangan memberikan juga dampak ekonomi yang signifikan, karena keberadaannya mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat. Namun, besarnya kontribusi ekonomi pertambangan tersebut tidak terlepas dari konsekuensi lingkungan dan sosial yang signifikan. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat bahwa aktivitas

pertambangan di berbagai wilayah Indonesia telah menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan lahan, serta permasalahan dengan penduduk akibat pengelolaan lingkungan yang belum optimal (JATAM, 2023).

Pada laporan publikasi JATAM 2023 Perusahaan PT Adimitra Baratama Nusantara secara empiris terbukti berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga. Berdasarkan temuan lapangan, tercatat nilai derajat keasaman (pH) air sumur warga yang melampaui baku mutu air bersih serta pH air limbah drainase yang melanggar ketentuan baku mutu air limbah daerah. Selain itu, pembuangan air limbah melalui drainase permukiman sepanjang $\pm 2,6$ km, beroperasinya pit tambang dengan jarak ± 300 meter dari pemukiman.

Fenomena ini menunjukkan adanya dilema antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial, yang menjadi bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan (Meiriani & Dunakhir, 2022). Perusahaan memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan antara produktivitas ekonomi dan pelestarian ekosistem, yang kemudian melahirkan konsep *sustainable development*. Konsep yang menjelaskan sebuah upaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan generasi mendatang untuk memfasilitasi kebutuhannya sendiri (Selpiyanti & Fakhroni, 2021).



Gambar 1. 2 Tren Indikator *Sustainable development* 2022-2024

Sumber: Diolah penulis berdasarkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut dapat dilihat hasil dari pengamatan sementara terhadap 37 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan memenuhi kriteria sampel penelitian selama periode 2022–2024, yaitu berdasarkan ketersediaan data pada *annual report*, terlihat adanya tren peningkatan nilai *sustainable development* Pada tahun 2022, rata-rata nilai *sustainable development* tercatat sebesar 30,04. Nilai tersebut selanjutnya mengalami peningkatan di 2023 menjadi 30,25, dan kembali menurun di 2024 menjadi 30,10. Meskipun tidak menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun, nilai *sustainable development* perusahaan relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Kondisi ini mengindikasikan entitas telah mengendalikan kinerja keberlanjutan, walaupun terdapat fluktuasi dalam implementasinya.

Sustainable development menekankan pentingnya strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan guna mendukung kemakmuran generasi saat ini dan generasi mendatang. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan generasi sekarang dengan tetap menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Perusahaan diharapkan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan rutin untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kemakmuran masyarakat pada masa mendatang (Damayanti & Yanti, 2023). Konsep ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial, melainkan harus dirancang agar menciptakan nilai keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks perusahaan, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya integrasi prinsip efisiensi ekonomi, tanggung jawab sosial, serta perlindungan lingkungan ke dalam strategi dan proses operasional (Trevanti & Yuliati, 2023).

Green accounting memainkan peran krusial sebagai jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sebagaimana ditegaskan oleh penelitian Dhar et al (2022) *green accounting* mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini bukan sekedar menggambarkan pertumbuhan entitas dalam hal manfaat ekonomi, namun juga menggambarkan konsekuensi lingkungan yang timbul sebagai akibat dari perolehan manfaat ekonomi perusahaan. Dengan kata lain, *green accounting* tidak hanya mencatat pendapatan atau laba, tetapi juga mengkuantifikasi dampak

negatif terhadap lingkungan seperti emisi karbon, penggunaan air berlebihan, pembuangan limbah berbahaya, atau degradasi ekosistem dalam satuan moneter. Pendekatan ini memungkinkan manajemen perusahaan untuk melihat secara utuh *trade-off* antara keuntungan finansial dan biaya ekologis yang ditimbulkan.

Green accounting bukan hanya respon terhadap tekanan regulasi atau ekspektasi pemangku kepentingan, melainkan juga fondasi strategis untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan lingkungan. Tanpa integrasi biaya lingkungan ke dalam sistem akuntansi inti, pelaporan keberlanjutan berisiko menjadi narasi kosong yang tidak mencerminkan realitas operasional (Dunakhir et al., 2024). Implementasi *green accounting* berkontribusi terhadap perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan konsekuensi lingkungan dari aktivitas operasionalnya dengan sistematis, sehingga membantu proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan. *Green accounting* dapat juga berfungsi sebagai sarana bagi para *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kesungguhan perusahaan dalam mewujudkan keberlanjutan (Adnyana et al., 2024)

Menurut hasil penelitian oleh Selpiyanti & Fakhroni (2021) dalam praktiknya manajemen perusahaan dapat mengimplementasikan *green accounting* sebagai instrumen pendukung agar tujuan keberlanjutan dapat tercapai secara efektif. Penerapan *green accounting* memungkinkan manajer untuk menilai dan mengendalikan akibat lingkungan dari kegiatan perusahaan secara lebih sistematis. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan keseimbangan antara pencapaian kinerja ekonomi dan dukungan terhadap tujuan pembangunan

berkelanjutan, sehingga nilai yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.

Insiden polusi lingkungan telah menjadi peringatan bagi pengembangan berkelanjutan di perusahaan yang ada di Indonesia sehingga melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021, telah mewajibkan perusahaan di sektor-sektor berdampak tinggi seperti manufaktur, pertambangan, dan kimia untuk menyusun dan mempublikasikan *sustainability report* secara berkala dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Peraturan ini mengoptimalkan keterbukaan dan pertanggungjawaban perusahaan untuk mengelola permasalahan lingkungan hidup dan sosial, serta menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. *Sustainability report* yang berkualitas tinggi diharapkan mampu mencerminkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan secara komprehensif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan perusahaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian Rizal & Firmansyah (2025) penerbitan laporan keberlanjutan tidak hanya perlu berfokus pada aspek pengungkapan, tetapi juga harus mampu mencerminkan implementasi praktik keberlanjutan yang dilakukan perusahaan. Transparansi informasi menjadi aspek yang krusial agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja perusahaan secara objektif dan komprehensif. Oleh karena itu, tingkat akurasi, kelengkapan, serta relevansi informasi yang disajikan dalam *sustainability report* menjadi indikator dalam mengevaluasi kualitas dan efektivitas pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan laporan keberlanjutan perlu didukung oleh sistem dan praktik internal yang mampu memastikan bahwa informasi yang diungkapkan benar-benar mencerminkan kinerja keberlanjutan perusahaan secara substansial. Kualitas laporan tersebut yang diukur berdasarkan kelengkapan, konsistensi, keterandalan, dan kesesuaian dengan standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi penentu utama apakah pelaporan tersebut telah mencerminkan akuntabilitas nyata (Tambunan & Firmansyah, 2025).

Fenomena yang tercermin dalam hasil penilaian PROPER, masih terdapat perusahaan tambang mendapatkan peringkat merah hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengungkapan keberlanjutan dan kinerja pengelolaan lingkungan di lapangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan yang belum berkualitas dapat menghambat peran perusahaan dalam mendukung pencapaian *sustainable development*, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai *sustainability report quality*. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa *sustainability report* berpotensi digunakan sebagai alat simbolik apabila tidak didukung oleh praktik operasional yang nyata, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai *sustainability reporting quality* dan perannya pencapaian *sustainable development* khususnya pada perusahaan pertambangan (Rizal & Firmansyah, 2025).

Pernyataan tersebut selaras dengan studi yang dilakukan oleh Muniroh et al (2023) menunjukkan penerapan *green accounting* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainable development*. Hal ini menggambarkan semakin

baik kemampuan entitas dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan biaya terkait lingkungan, maka akan semakin meningkat kontribusinya terhadap keberlanjutan perusahaan. Hubungan positif ini menegaskan bahwa keberlangsungan bisnis sangat terkait dengan praktik *green accounting*, di mana perusahaan membutuhkan penerapan ini untuk dapat terus berkembang.

Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil studi oleh May et al (2023) penerapan *green accounting* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *sustainable development*. Pengungkapan *green accounting* yang belum maksimal dan belum mampu berkontribusi nyata bagi keberlanjutan entitas.

Penelitian Dhar et al (2022) menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* yang efektif memberikan kontribusi terhadap peningkatan *sustainable development*. Semakin berkualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, semakin tinggi kemampuan dalam mendukung pembangunan keberlanjutan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial dapat memperkuat hubungan *green accounting* dan *sustainable development* pada entitas yang sangat mencemari di Bangladesh.

Berdasarkan penelitian Dhar et al. (2022) yang dilakukan di Bangladesh, penelitian ini ingin melanjutkan dan mengembangkan kajian tersebut dengan melakukan perbedaan sampel pada konteks Indonesia, khususnya pada perusahaan pertambangan. Pemilihan sampel ini didasarkan pada perusahaan pertambangan yang memiliki dampak lingkungan jangka panjang, di mana kerusakan ekosistem akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam membutuhkan waktu pemulihan (*recovery*) yang sangat lama dan biaya yang besar. Kondisi ini

menjadikan perusahaan pertambangan berada di bawah tekanan yang tinggi untuk menerapkan *green accounting* serta mengungkapkan *sustainability report* yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pembangunan berkelanjutan.

Green accounting dan penyusunan *sustainability report* yang berkualitas menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan bukan sekedar mementingkan tercapainya laba, namun juga selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pertanggungjawaban sosial. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul “Analisis Dampak Penerapan *Green accounting* Terhadap *Sustainable development* Dengan *Sustainability reporting Quality* Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap *sustainable development*?
2. Apakah *sustainability reporting quality* berpengaruh terhadap *sustainable development*?
3. Apakah *sustainability reporting quality* memoderasi pengaruh *green accounting* terhadap *sustainable development*?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *green accounting* terhadap *sustainable development*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sustainability reporting quality* terhadap *sustainable development*
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *sustainability reporting quality* memoderasi pengaruh antara penerapan *green accounting* dengan *sustainable development*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *green accounting* dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dimoderasi oleh *sustainability reporting quality*. Di samping itu, wawasan serta pengetahuan yang diperoleh selama proses penelitian diharapkan dapat mendukung pengembangan kompetensi peneliti, baik dalam lingkungan profesional maupun dalam kehidupan setelah masa perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian teoritis mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan mempertimbangkan peran *green accounting* dan *sustainability reporting quality*, sehingga teori yang telah ada dapat semakin relevan dan sesuai dengan kondisi aktual.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa, serta berfungsi sebagai bahan perbandingan dalam pengembangan kajian sehingga teori yang digunakan dapat disempurnakan dan dikembangkan lebih lanjut.